

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tatanan hidup berbangsa dan bernegara tidak lepas dari hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Sebaliknya, kondisi buruk, kemiskinan, kekacauan dari suatu negara, juga tidak lepas dari pengaruh pemimpin. Oleh sebab itu kehadiran pemimpin sangat penting dalam sebuah negara. Kepemimpinan merupakan suatu tugas yang menyeluruh, mengurus suatu urusan, baik agama maupun politik untuk tujuan kemaslahatan umat. Kesejahteraan umat manusia tidak dapat terwujud secara sempurna kecuali dengan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemimpin.

Pemimpin memiliki tugas untuk mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Kepemimpinan merupakan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan.<sup>1</sup> Menurut pandangan Islam kepemimpinan bermakna menggerakkan orang lain dengan kemampuan maupun keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka, kepemimpinan lahir dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Islam juga memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam masyarakat, yaitu untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, dan membuat kebijakan yang dilandaskan syariat agama.

Kepemimpinan merupakan dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.<sup>2</sup> Seorang pemimpin tidak boleh membedakan antara jenis kelamin, status sosial atau profesinya. Sebab menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu kemampuan pribadi dan karakteristiknya masing-masing. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Maka oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Allah telah menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama yakni berupa potensi akal dan potensi hidup. Laki-

---

<sup>1</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam antara Konsep dan Realita* (Yogyakarta: AK Group, 2014), 53.

<sup>2</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 25.

laki dan perempuan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat tempat mereka hidup.

Ketidakadilan sosial terhadap perempuan merupakan ketidakadilan sosial yang tertua dalam sejarah manusia. Masih banyak terdengar cerita klasik dalam masyarakat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam sehingga memberi gambaran inferioritas terhadap perempuan dan superioritas laki-laki.<sup>3</sup> Hal inilah yang dijadikan dalil (*hujjah*) dan argumen bagi tindakan-tindakan tidak adil atas perempuan dari waktu ke waktu, sehingga memunculkan akses negatif terhadap eksistensi perempuan. Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dan keberadaannya tergantung terhadap laki-laki.

Padaحال, sesungguhnya Islam memberikan potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persamaan posisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, *mu'amalah*, *beramar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, menuntut ilmu pengetahuan, bahkan ikut serta dalam berjihad *fi sabilillah* (perang melawan musuh-musuh Islam). Pada perdebatan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin memunculkan dua golongan yang saling berseberangan. Golongan pertama, adalah beberapa tokoh Islam yang tidak memperbolehkan kepemimpinan perempuan seperti presiden, perdana menteri, menteri, dan yang sederajatnya. Para pemikir yang termasuk dalam golongan ini adalah Al-Mawardi, al-Bassam, dan Yusuf al-Qaradhawi.

Al-Mawardi adalah seorang ulama yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin atau hakim. Beliau menegaskan bahwa syarat menjadi hakim haruslah laki-laki manakala perempuan tidak boleh menjadi hakim karena tidak cukupnya kemampuan perempuan untuk memangku jabatan tersebut. Akan tetapi, Al-Mawardi tidak meletakkan syarat-syarat untuk seorang pemimpin karena syarat-syarat bagi seorang hakim menurut Al-Mawardi adalah seorang laki-laki, sama dengan yang disyaratkan bagi pemimpin.

Sama halnya dengan Al-Mawardi, menurut al-Bassam tidak sah kepemimpinan seorang perempuan, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin tidak akan senang, baik dalam urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi*.<sup>4</sup> Di sisi lain, Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan sedikit berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Ia

---

<sup>3</sup>Ahmad Fudhailidi L, *Perempuan Lembah Suci :Kritik atas Hadits-hadits Sahih* (Yogyakarta: Piar Mdiq, 2014), 150.

<sup>4</sup> Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam*, Juz ke 6, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 142.

menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memegang kepemimpinan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Perihal yang dimaksud dengan *wilayah al- ammah* adalah kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat,<sup>5</sup> atau kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni pemimpin *daulah* (negara), sebagaimana yang dimaksud kata *amrahum* (urusan mereka), yaitu urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum.<sup>6</sup> Artinya, Yusuf Al-Qaradawi tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara.

Golongan kedua, tokoh Islam yang memperbolehkan kepemimpinan perempuan yaitu Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily dan Fatima Mernissi. Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily berpendapat bahwa sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi al-insaniyah (kemanusiaan), Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki al-ahliyah (keahlian) dalam masalah ibadah, dan dalam hal balasan dari perbuatan baik buruk yang dilakukan. Beliau juga tidak menyinggung hadis di atas, sehingga tidak dapat dipastikan bagaimana pemahamannya dalam menganalisis hadis tersebut. Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansury al-Sinkily melihat kondisi perempuan di masa Rasul jauh berbeda dengan keadaan perempuan dimasa sekarang. Baginya yang terpenting adalah setiap umat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepada-Nya.<sup>7</sup>

Pandangan lain tentang kepemimpinan perempuan disampaikan oleh Fatima Mernissi. Ia merupakan tokoh feminis muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan sejarah dalam pemahaman kontekstual mencoba mengkritisi persoalan fiqh perempuan. Fatima Mernissi dalam pemikirannya tentang perempuan sebagai kepala negara membolehkan perempuan sebagai kepala negara. Menurut Fatimah Mernissi pemaknaan tentang kepala negara berbeda dengan khalifah. Melihat hadis yang yang digunakan rujukan sebagai pelarangan perempuan sebagai Kepala Negara, Mernissi tidak melihat *asbabul wurud* munculnya hadis tersebut. Dia juga memunculkan data-data sejarah yang melihat bahwa muslimah atau perempuan yang memimpin negara dan terlibat dalam kegiatan politik dengan metode yang khas yakni *double investigation*. Metode tersebut menggunakan kajian historis dan metodologis terhadap hadis, perawi, situasi dan

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, (Bandung: Arsy, 2012), 105.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, jilid.2. cet.ke-1. (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), 529.

<sup>7</sup> Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 64.

kondisi tentang di mana, kapan, mengapa, dan kepada siapa hadis tersebut muncul dan beredar.<sup>8</sup>

Kepemimpinan perempuan di Indonesia, misalnya didasarkan pada undang-undang. Meskipun kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan, faktanya banyak perempuan menjadi kepala negara di dunia. Artinya semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin (seperti presiden, gubernur, bupati, anggota dewan dan sebagainya). Salah satu buktinya Indonesia pernah dipimpin oleh presiden perempuan pertama yaitu Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001-2004. Megawati Soekarnoputri menjabat menjadi presiden ke lima Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai presiden, Megawati sempat menjabat terlebih dahulu sebagai wakil presiden. Capaian ini tidak mudah begitu saja dicapai oleh Megawati. Ia berjibaku dalam pusran politik Orde Baru, memperkuat basis masa PDIP serta ikut aktif dalam percaturan politik pasca-Reformasi.<sup>9</sup>

Kemenangan Megawati tak lepas dari peran Koalisi Poros Tengah. Koalisi Poros Tengah merupakan koalisi partai politik yang terbentuk pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Partai politik yang tergolong dalam koalisi tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi partai-partai Islam ini dibentuk oleh Amien Rais setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilu legislatif pada 1999. Latar belakang terjadinya Poros Tengah didorong oleh pemilihan umum (pemilu) bulan Juni 1999 yang dimenangkan oleh PDI-P dengan persentase sebesar 33 persen. Waktu itu, ada kemungkinan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR). Sedangkan PAN, yang pada Desember 1998 mengumumkan mengusung Amien Rais sebagai calon presiden, hanya mendapat 34 kursi di DPR. Oleh karena itu, pada 7 Oktober 1999, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, membentuk koalisi partai berasaskan Islam. Koalisi yang disebut Poros Tengah itu mengangkat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

---

<sup>8</sup> Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 49.

<sup>9</sup> Tempo, *Ulang Tahun ke -71, Berikut Kiprah Politik Megawati Soekarnoputri*, 07 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1053148/ulang-tahun-ke-71-berikut-kiprah-politik-megawati-soekarnoputri/full&view=ok>.

sebagai calon presiden, yang akan bersaing secara langsung melawan Megawati dan Habibie.<sup>10</sup>

Tujuan Poros Tengah adalah untuk mengimbangi atau bahkan menjegal dua lawan yang saat itu menjadi calon presiden Indonesia, yaitu Megawati dan Habibie. Poros Tengah menjadi cara alternatif karena dalam pemilu 1999, tidak ada partai yang menjadi pemenang mutlak. Partai koalisi Poros Tengah Berikut ini partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Poros Tengah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan (PK) Partai Bulan Bintang (PBB) Hasil Poros Tengah Pada 20 Oktober 1999, dilakukan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Gus Dur dari koalisi Poros Tengah. Poros Tengah mengantarkan Gus Dur sebagai presiden keempat Indonesia dengan perolehan suara sebanyak 373 dalam pemilihan presiden di MPR. Sementara Megawati hanya mendapat perolehan 313 suara, atau menjadi suara kedua terbanyak.

Sebagai bentuk kompromi, Gus Dur berusaha meyakinkan Megawati untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pada 21 Oktober 1999, Megawati pun resmi terpilih mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Tidak hanya itu, Megawati menjadi wakil presiden perempuan pertama di Indonesia. Sedangkan Amien Rais, berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua MPR. Akibat Poros Tengah Pada pertengahan tahun 2000, pemerintahan Gus Dur mulai tidak stabil. Pasalnya, Amien Rais menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Gus Dur dan justru siap berkoalisi dengan PDI-P.<sup>11</sup> Amien Rais, yang mengusung Gus Dur, dengan mudah berbalik arah dan turut mendorongnya lengser dari kursi kepresidenan.

Akibatnya, Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan lewat Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sementara Megawati tampil menjadi presiden sampai 2004, begitu pula Amien Rais yang menyelesaikan masa tugasnya hingga 2004. Perkembangan Koalisi Poros Tengah sempat kembali diangkat sewaktu pemilihan umum 2014 akan dilaksanakan. Ada usulan agar partai-partai Islam kembali berkoalisi untuk mengajukan calon presidennya masing-masing dalam

---

<sup>10</sup> Gus Nuril Soko Tunggal, *Ritual Gus Dur dan Rahasia Kewaliannya*, (Yogyakarta: Galangpress, 2010), 35.

<sup>11</sup> Greg Barton, Abdurrahman Wahid: *Muslim Democrat, Indonesia President*. (Sydney: University of New South Wales, 2017), 44.

melawan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tetapi, Amien Rais mengatakan bahwa peluang untuk koalisi Poros Tengah sudah tidak sebaik sebelumnya. Partai-partai Islam saat itu diakui tidak seakur sedia kala, sehingga kecil kemungkinannya untuk memenangkan pemilu 2014.

Dikeluarkannya memorandum II yang berlanjut dengan digelarnya Sidang Istimewa (SI) MPR RI untuk meminta pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid merupakan suatu peristiwa atau event yang menjadi sumber daya (resources) bagi isi berita media massa, antara bulan Mei sampai menjelang 01 Agustus 2001. Akan tetapi, karena sesuatu hal, SI diselenggarakan pada 21 Juli 2001. Menarik untuk dicermati dalam kurun waktu tersebut, pemberitaan tentang Wapres Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, menyusul ditolaknya pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada SI MPR RI. Hal ini sudah terlaksana, mengingat sikap Wapres Megawati dan juga sikap partainya (PDIP) yang sudah tidak mau kompromi lagi dengan presiden. Inisiatif Gus Dur gagal mengadakan pertemuan pimpinan parpol di Istana Bogor, 9 Juli 2001, hanya dihadiri oleh Ketua PKB, Matori Abdul Jalil, antara lain, disebabkan oleh pernyataan wapres yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, di sela acara Lemhanas, bahwa “kita sudah pilih orang” untuk menjadi presiden.

Sebenarnya, kesiapan Megawati menjadi Presiden RI, bukanlah kali ini saja. Tetapi, juga sudah mengemuka sejak Kongres PDIP yang mengantarkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDIP dan mengamanatkan bahwa calon Presiden RI dari PDIP pasca Pemilu 1999 adalah Megawati Soekarnoputri.<sup>12</sup> Ini dibuktikan dengan walk out-nya perjuangan PDIP pada Sidang Umum MPR RI tahun 2000. Sebagai peraih suara terbanyak Pemilu 1999, dengan kursi yang paling banyak di parlemen, sebetulnya F-PDIP berpeluang besar menjadikan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, ketika itu. Tetapi, akibat scenario kelompok poros tengah, yang kurang menghendaki Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, dengan alasan wanita menjadi Presiden masih menjadi perdebatan di antara

---

<sup>12</sup> Aning Sofyan Sadikin, *Presiden Wanita dalam Perspektif Media*, diakses dari: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1112/690>, pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 11.03.

para ulama, terlebih di negara kita, maka jadilah, ketika itu, KH. Abdurahman Wahid menjadi Presiden RI yang ke-empat.

Runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya sosok Megawati, telah menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa Mega layak tampil sebagai presiden. Selain itu, Mega yang sering di cap mewarisi kharisma bapaknya, Proklamator RI, Ir. Soekarno, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin partai politik (PDIP) dan membawa PDIP sebagai pemenang pada Pemilu 1999. Selain berita kemenangan partainya, sejarah tampilnya megawati ke pentas politikpun, tidak luput mendapat perhatian serius dari media. Hadirnya putri sulung Bung Karno ke pentas politik yang bermula dari perlawanannya menghadapi tirani Orde Baru yang secara logika sulit ditumbangkan, merupakan nilai plus yang meraih simpati rakyat, seperti kasus 27 Juli 1996. Polemik tentang presiden wanita (pro-kontra presiden wanita), menjadikan media massa sebagai ajang perebutan pengaruh, sekaligus juga komoditas politik dalam menyikapi kemungkinan Megawati menjadi presiden wanita pertama di negeri ini.

Perlombaan pembentukan opini tentang sah tidaknya wanita menjadi pemimpin negara dalam pandangan Islam yang dilakukan oleh beberapa media massa, mengakibatkan langkah Mega, pasca Pemilu 1999, sesaat tertahan menjadi Presiden, meskipun PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999.<sup>13</sup> Tetapi, setelah dikeluarkannya memorandum II yang berlanjut pada rekomendasi Sidang Istimewa MPR RI, peluang Megawati untuk naik menjadi Presiden RI terbuka kembali, walaupun masih ada yang mempersoalkan sah atau tidaknya wanita menjadi Presiden di sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam.

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di Indonesia tidak hanya dapat diartikan sebagai capaian personal, melainkan bentuk dari capaian seorang perempuan dalam lingkup yang lebih luas. Perempuan boleh dan bisa menjadi seorang pemimpin (presiden atau kepala negara). Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan masih ada di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa tokoh dan kelompok-kelompok yang tidak senang dan melarang perempuan menjadi pemimpin. Baik dengan alasan ideologis, agama, kultur hingga

---

<sup>13</sup> Bahtiar Efendi, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokratisasi* (Jakarta: Galang Press, 2013), 32.

pelabelan perempuan sebagai makhluk lemah. Apalagi banyak lapisan kelompok masyarakat di Indonesia yang memegang teguh konsep patriarki dalam level berbeda. Sehingga peran perempuan di beberapa lini dibatasi dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Dewasa ini, pandangan-pandangan kerdil terhadap perempuan mulai terkikis dengan munculnya paham feminisme, atau paham bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki (*gender*). Isu tersebut semakin menarik perhatian masyarakat sebab keterbukaan informasi di era digital. Hal ini juga yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang isu kepemimpinan perempuan khususnya Kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004 . Dorongan lain yakni peneliti tertarik terhadap pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan dari berbagai perspektif kalangan fundamental, sekuler dan moderat. Jadi, peneliti mengajukan judul “**Pandangan Islam tentang Kepemimpinan Perempuan: Studi atas Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di Indonesia Tahun 2001-2004**”

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti membuat fokus penelitian. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pokok bahasan penelitian. Peneliti fokus pada aspek kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam serta kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri di Indonesia tahun 2001-2004.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri di Indonesia Tahun 2001-2004?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan.
2. Mengetahui kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri di Indonesia Tahun 2001-2002.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ada sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan.
- b. Dapat memberikan gambaran mengenai kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri di Indonesia tahun 2001-2004.
- c. Menjadi acuan untuk mahasiswa lain dan para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
- d. Menambah khazanah keilmuan bidang PPI (Pemikiran Politik Islam)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perspektif kepemimpinan perempuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang lainnya dalam upaya mengkaji dan mendalami kehidupan sosial yang setiap waktu mengalami perubahan.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan serta kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Aung San Suu Kyi, agar masyarakat memiliki pandangan yang lebih kompleks terhadap konsep kepemimpinan.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas tulisan skripsi ini, maka materi-materi yang tertera dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** Bab ini berisikan kajian teoritis yang berupa pengertian dan definisi kepemimpinan dan juga tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam. Selain itu, juga berisi tentang kajian mengenai

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004. Selanjutnya, kajian berupa penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir guna menjadi acuan akademis pada penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN** Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Bab ini membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan yang berisi pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004.

**BAB V PENUTUP** Berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

